



**PEMERINTAH  
KOTA MOJOKERTO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Raden Wijaya No.19,  
Kota Mojokerto, Jawa Timur 61321



**RINGKASAN EKSEKUTIF**  
**DOKUMEN INFORMASI KINERJA LINGKUNGAN**  
**HIDUP DAERAH KOTA MOJOKERTO**  
**TAHUN 2025**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

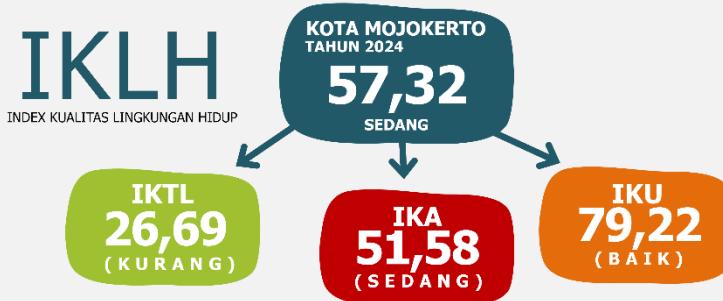
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan dokumen yang berisikan tentang basis data secara spasial untuk meningkatkan mutu informasi mengenai pengelolaan lingkungan hidup sekaligus sebagai sistem pelaporan publik serta bentuk dari akuntabilitas publik. Penyusunan dokumen IKPLHD juga akan dinilai dalam Nirwasita Tantra, yang merupakan penghargaan dari pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Hal ini sejalan dengan dasar amanat yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, dokumen IKPLHD Kota Mojokerto Tahun 2025 ini disusun dengan menggunakan pedoman penyusunan yang tertulis dalam Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 mengenai Pedoman DIKPLHD Tahun 2024. Sesuai dengan pedoman tersebut, dokumen IKPLHD Kota Mojokerto disusun dengan melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi mencakup metode analisis *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response* (D-P-S-I-R) terhadap 6 (enam) matra antara lain : tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola.



Gambar 1. Metode Analisis Penyusunan DIKPLHD Kota Mojokerto Tahun 2025  
Sumber : Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan analisis perhitungan IKL, IKA dan IKU Kota Mojokerto Tahun 2024, maka dapat dinilai IKLH Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah 57,32. Hal ini dapat disimpulkan bahwa artinya kondisi kualitas lingkungan hidup Kota Mojokerto adalah sedang, yang artinya masih perlu peningkatan pada beberapa hal penting dan berpengaruh yang akan dianalisis secara mendalam pada dokumen IKPLHD Kota Mojokerto Tahun 2025 ini.



Gambar 2. Index Kualitas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto Tahun 2024

Kota Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya secara geografik berada pada  $7^{\circ}33'$  Lintang Selatan serta  $112^{\circ} 28'$  Bujur Timur (RTRW Kota Mojokerto, Tahun 2023-2043). Kota Mojokerto memiliki luas kawasan sebesar 2.048 Hektar dan terdiri atas 3 kecamatan, yaitu antara lain : Kecamatan Prajuritkulon, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan. Pada masing-masing kecamatan memiliki beberapa kelurahan, antara lain :

1. Kecamatan Prajuritkulon, yang terdiri dari : Kelurahan Blooto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Prajurit Kulon, Kelurahan Pulorejo dan Kelurahan Surodinawan;
2. Kecamatan Magersari yang terdiri dari : Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gedongan, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Magersari, dan Kelurahan Wates;
3. Kecamatan Kranggan yang terdiri dari : Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Meri, Kelurahan Miji, Kelurahan Purwotengah dan Kelurahan Sentanan.

Adapun yang menjadi batas administrasi Kota Mojokerto, antara lain :

Batas Selatan : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;

Batas Timur : Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;

Batas Utara : Sungai Brantas; dan

Batas Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## **I. Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* (DPSIR)**

Dokumen DIKPLHD Kota Mojokerto Tahun 2025 memuat analisis terkait 6 (enam) isu, yaitu tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan dan tata kelola dengan model *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response* (D-P-S-I-R).

### **I.1 TATA GUNA LAHAN**

Faktor pendorong (*driving force*) dalam isu tata guna lahan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk kenaikan yang signifikan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024.

Pada awal Tahun 2020 penduduk Kota Mojokerto sebesar 140.075 jiwa kemudian naik dari tahun ke tahun hingga sebesar 142.242 jiwa di Tahun 2024. Kenaikan yang signifikan tiap tahunnya dipengaruhi oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2024, yakni sebesar 0,99. Faktor pendorong lainnya adalah adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto dari Tahun 2023 sebesar 2,79 persen bertambah menjadi 5,32 persen di Tahun 2024.

Kenaikan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto memberikan dampak secara signifikan terhadap adanya perubahan penggunaan lahan dan jumlah tutupan lahan. *Pressure* (tekanan) terhadap isu lahan terkait perubahan yang signifikan pada luas penggunaan lahan jenis Perumahan, yang awalnya di Tahun 2019 sebesar 305,7 hektar kemudian bertambah menjadi 666,706 hektar di Tahun 2024, sehingga terjadi pertambahan luas kawasan permukiman sebesar 361,006 hektar selama rentang Tahun 2019 hingga Tahun 2024.

Dalam grafik, juga terlihat adanya perubahan yang signifikan terhadap jenis lahan pekarangan, yang awalnya di Tahun 2019 sebesar 467,007 hektar, kemudian turun hingga menjadi 5,682 hektar sehingga lahan pekarangan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 461,325 hektar dalam rentang waktu Tahun hingga Tahun 2024. Data analisis kondisi (state) terhadap tata guna lahan, menunjukkan tingginya prosentase kawasan budidaya sebesar 1825,55 Ha (89%) dan kawasan lindung sebesar 221,97 Ha (11%). Adapun state (kondisi) lainnya terhadap isu tata guna lahan, yaitu jumlah tutupan lahan semakin berkurang.

Berdasarkan data dari DLH Kota Mojokerto, dapat diketahui bahwa Luas luasan Tutupan Lahan Kota Mojokerto Tahun 2024 sebesar 158,01 Ha, yang terdiri atas RTH sebesar 91,43 hektar (58%), sedangkan luasan Taman Kehati adalah sebesar 0,66 hektar (1%), dan luasan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya sebesar 65,92 hektar (41%). Luas tutupan lahan selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL).



Gambar 3. Persentase Tutupan Lahan di Kota Mojokerto (a) dan Kategori Nilai IKL (b)  
 Sumber : DLH Kota Mojokerto, 2024

Berdasarkan data dari DLH Kota Mojokerto, dapat diketahui bahwa Luas luasan Tutupan Lahan Kota Mojokerto Tahun 2024 sebesar 158,01 Ha, yang terdiri atas RTH sebesar 91,43 hektar (58%), sedangkan luasan Taman Kehati adalah sebesar 0,66 hektar (1%), dan luasan Tutupan Vegetasi Relevan lainnya sebesar 65,92 hektar (41%). Luas tutupan lahan selanjutnya menjadi dasar dalam perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Adapun Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah 26,69.



Gambar 4. Trend Nilai IKL 2021 - 2024  
Sumber : DLH Kota Mojokerto, 2025

Jika merujuk pada kategori nilai IKL, maka kondisi IKL Kota Mojokerto Tahun 2024 berada pada kategori kurang. Jika dibandingkan dengan tren nilai IKL dari tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai IKL turun dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023, namun mengalami kenaikan pada Tahun 2024 (Gambar 4).

*Impact* dari isu Lahan adalah suhu rata-rata Kota Mojokerto. Berdasarkan data BPS dapat diketahui bahwa Kota Mojokerto telah mengalami perubahan kenaikan suhu dari Tahun 2023 yang awalnya suhu rata-rata sebesar 27,78°C menjadi 28,34 °C di Tahun 2024.



Gambar 5. Grafik Suhu Rata-rata Kota Mojokerto Tahun 2022-2024 (Sumber : BPS, 2025)

Beberapa *response* atau upaya terkait isu lahan antara lain:

1. Response atau Upaya tindak lanjut terhadap kenaikan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana oleh Dinkes PPKB Kota Mojokerto Tahun 2024, antara lain :

- Peningkatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dari target 1 unit menjadi 13 unit.
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan target kinerja 100%.
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dengan target kinerja 100%.

2. Response atau Upaya tindak lanjut terhadap Peningkatan Kualitas Lahan, yang meliputi :

- a. Pengembangan Taman dan RTH Kota. Upaya yang dilaksanakan diantaranya pengembangan Taman Bermain Suromulang Dalam, Taman Jl. Suromulang Timur, Taman Kedungsari, Taman Kemasan, Taman Panderman, Taman Prapanca, Taman Sekarputih, Alun-Alun Wiraraja, revitalisasi Taman Semeru, serta rehabilitasi Taman Jl. Raya Suromulang dan Taman Hutan Kota) di Tahun 2023 dan di Tahun 2024 dilaksanakan pembangunan area RTH baru berupa Taman Bahari Mojopahit (TBM) yang terletak di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.
- b. SUHITA (Sukseskan Jemput Bola Pendampingan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota). Adapun beberapa kegiatan yang termasuk dalam SUHITA, antara lain: Program Pendampingan Sekolah Adiwiyata (SMPN 1 Mojokerto, UPT SMPN 9, SDN Wates 3, SDN Kranggan 1, SDN Pulorejo yang mendapat Penghargaan Adiwiyata Mandiri Tahun 2024, serta SDN Kranggan 4 dan SDN Miji 4 yang mendapat penghargaan Adiwiyata Nasional Tahun 2024), Program Pembinaan Kelurahan Berseri (Kelurahan Berseri Kategori Mandiri terdapat pada Kelurahan Meri, Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Blooto. Kemudian pada Kelurahan Berseri Kategori Pratama terdapat pada Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Wates, Kelurahan Miji dan Kelurahan Balongsari), serta Proklim (Penanaman pohon perindang & buah yang dilakukan di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari, Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan), Gerakan Penanaman Pohon (dilaksanakan di Pekayon, Suromulang, Ketidur, Kemasan, Benteng Pancasila, Watudakon, Empunala, dan Jl. Ir. Sukarno serta penanaman pohon pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 di TPA Randegan), Kegiatan *Urban Farming* oleh 18 KWT di Kelurahan, Penerapan Elemen *Green Building* (pada bangunan pemerintahan yaitu di Sabha Pambojana serta Sabha Mandala Tama, Pengembangan Taman Pintar dan Kebun Kelor di Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon, Pekarangan Pangan Lestari di Kelurahan Pulorejo, Revitalisasi Alun-alun (penatan tanaman, paving dan lampu) serta Pengadaan lahan makam baru yang dikaji oleh DPUPR Kota Mojokerto.

3. Response atau Upaya Tindak Lanjut terkait Regulasi Pengendalian Kerusakan Lahan, antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023 – 2043

- b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mengatur tentang larangan merusak atau menebang pohon/tanaman.
  - c. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perlindungan Pohon mengatur tentang program perlindungan pohon yang bertujuan untuk melestarikan pohon.
  - d. Rencana Pembangunan Daerah Kota Mojokerto tahun 2024-2026 mengenai Target Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2024 Kota Mojokerto (25,41).
4. Program dan Anggaran Penanganan Isu Kualitas Lahan yang terwujud dalam Penetapan Program dan Anggaran dalam Peningkatan Isu Kualitas Lahan dan terakomodasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

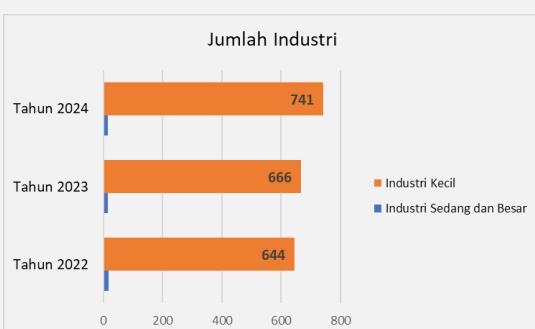
## I.2 KUALITAS AIR

Faktor pendorong isu kualitas air adalah kondisi akses sanitasi dan adanya kegiatan industri yang ada di Kota Mojokerto. Kondisi akses sanitasi disajikan dalam data persentase akses sanitasi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang menunjukkan adanya peningkatan akses dari BABS terbuka, BABS tertutup, layak bersama, layak sendiri, hingga aman di tingkat kabupaten/kota.



Gambar 6. Akses Sanitasi Kota Mojokerto Tahun 2024 (Dinkes Kota Mojokerto, 2025)

Berdasarkan data, Kota Mojokerto telah mencapai 0% BABS terbuka maupun tertutup. Sedangkan kondisi sanitasi layak Bersama sebanyak 6%, kondisi Sanitasi Layak sendiri sebesar 65% dan kondisi sanitasi aman sebanyak 29%.



Gambar 7. Peningkatan Jumlah Industri Kecil di Kota Mojokerto Tahun 2024 (BPS, 2025)

Berdasarkan data dari BPS dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah industri kecil dari Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Pada Tahun 2022 jumlah industri kecil sebanyak 644 dan meningkat menjadi 666 di Tahun 2023. Pada 2024 juga mengalami peningkatan sehingga mencapai 741 total jumlah industri kecil yang ada di Kota Mojokerto.

*Pressure* atau tekanan terhadap isu kualitas air dapat dianalisis dari adanya potensi pencemaran yang ada di sepanjang sungai di Kota Mojokerto serta banyaknya ijin yang dikeluarkan terkait SPPL dan Pertek Limbah B3.

Kondisi Pencemaran Sungai sepanjang Tahun 2024, antara lain :

- a. Limbah rumah tangga yang terjadi di Sungai Ngrayung (Jembatan Kuwung) yang merupakan Limbah domestik dari permukiman, peternakan kambing, dan pertanian (lintas Kabupaten Mojokerto) dan di Sungai Brantas yang merupakan Limbah rumah tangga dari afvoer Brawijaya yang langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan.
- b. Terjadinya *Bloom Algae*  
 Pada Agustus Tahun 2024 terjadi fenomena yakni air Sungai Ngrayung di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, sungai menjadi berwarna merah. Hal ini dikarenakan adanya beban nutrien berlebih sehingga meningkatkan kandungan organik pada sungai dan mengakibatkan adanya *bloom algae* berwarna merah sebagai bentuk dari ledakan populasi mikroalga kemudian memunculkan warna kemerahan pada air sungai.
- c. Pembuangan Limbah Padat  
 Potensi pencemaran sungai bersumber dari pembuangan limbah padat yang dibuang langsung ke sungai mengakibatkan sedimentasi dan memperburuk kualitas air. Hal ini terjadi di aliran Sungai Sadar, Sungai Brangkal, Sungai Cemporat dan Sungai Ngrayung.
- d. Penggunaan Pupuk dan Pestisida dalam Pertanian  
 Limbah kimia dari aktivitas pertanian meningkatkan kadar fosfat, menyebabkan eutrofikasi yang memicu pertumbuhan gulma seperti enceng gondok, serta menurunkan kadar oksigen terlarut (DO). Contoh: Aktivitas pertanian di bantaran Sungai Sadar (Lintas Kabupaten Mojokerto).



Gambar 8. Pencemaran Sungai Ngrayung di Kota Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data dari DLH Kota Mojokerto, sepanjang Tahun 2024 dapat diketahui adanya 11 kegiatan yang mengajukan SPPL pada DLH Kota Mojokerto, 9 diantaranya adalah kegiatan sekolah. Sedangkan untuk daftar Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diajukan Tahun 2024, terdapat 5 kegiatan yang mengajukan, diantaranya adalah kegiatan supermarket dan klinik serta kegiatan laboratorium Kesehatan dan hotel.

Sedangkan dalam data permohonan Pertek Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah selama Tahun 2024, terdapat 7 perusahaan yang mengajukan, antara lain kegiatan industri alas kaki, suku cadang dan aksesoris mobil, hotel, rumah sakit dan *real estate*.

*State* atau Kondisi isu kualitas air akan dijabarkan mengenai kondisi baku mutu air sungai dan perhitungan indeks kualitas air (IKA) di Kota Mojokerto Tahun 2024.

Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto secara rutin melaksanakan pengawasan melalui uji kualitas air sungai yang ada di keenam sungai utama Kota Mojokerto, yaitu Sungai Brantas, Sungai Brangkal, Sungai Ngotok, Sungai Ngrayung, Sungai Cemporat dan Sungai Sadar. Dari keenam sungai tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menguji kualitas air sungai pada 19 titik dengan fruksesi sebanyak 2 kali dalam setiap tahunnya. Sehingga didapatkan 38 data hasil uji terhadap kualitas air sungai pada Tahun 2024. Hasil status mutu air menghasilkan 3 data uji (8%) menunjukkan hasil kualitas baik, sedangkan 35 data uji lainnya (92%) menunjukkan kualitas air sungai pada cemar ringan.

Kondisi status mutu air sungai di Kota Mojokerto Tahun 2024, selanjutnya menjadi dasar data dalam menganalisis perhitungan indeks kualitas air (IKA) Tahun 2024. Prosentsase air sungai dengan status mutu cemar ringan hingga baik = 100%. Sehingga Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 : 51,58. Berdasarkan hasil kategori, nilai IKA Kota Mojokerto Tahun 2024 berada dalam kondisi Sedang.



Gambar 9. Grafik Status Mutu Air di Kota Mojokerto Tahun 2024  
 Sumber : DLH Kota Mojokerto, 2024

Kategori	Nilai IKA
Sangat Baik	$70 \geq \text{IKA} \geq 65$
Baik	$65 > \text{IKA} \geq 60$
Cukup Baik	$60 > \text{IKA} \geq 55$
<b>Sedang</b>	<b><math>55 &gt; \text{IKA} \geq 50</math></b>
Buruk	$50 > \text{IKA} \geq 30$
Sangat Buruk	$30 > \text{IKA} > 10$

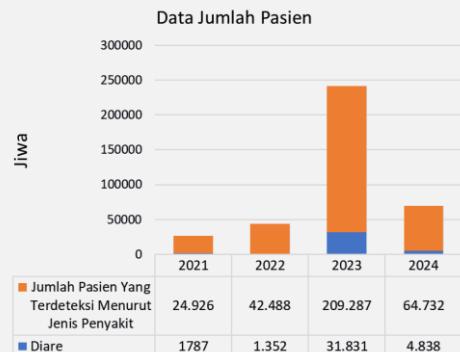
Gambar 10. Kategori Nilai IKA  
 Sumber : DLH Kota Mojokerto, 2024

Jika melihat kecenderungan tren IKA dari tahun sebelumnya, nilai IKA Kota Mojokerto cenderung turun dari Tahun 2022 sebesar 58,95 kemudian di Tahun 2023 sebesar 52,63. Serta kemudian kembali menurun di Tahun 2024 menjadi sebesar 51,58. Berikut gambar yang menunjukkan tren nilai IKA dari Tahun 2021 hingga Tahun 2024.

Dampak yang menjadi akibat dari isu kualitas air adalah adanya potensi konsumsi air yang telah tercemar bakteri, sehingga dapat menimbulkan penyakit diare. Berdasarkan data BPS, dapat dilihat data jumlah pasien yang terdeteksi diare di Tahun 2021 sebanyak 1.787 jiwa kemudian meningkat hingga Tahun 2024 menjadi 4.838 jiwa.



Gambar 11. Tren Nilai IKA 2021 - 2024  
Sumber : DLH Kota Mojokerto, 2025



Gambar 12. Data Jumlah Pasien Diare di Kota Mojokerto (BPS, 2022-2025)



Gambar 13. Evaluasi Implementasi SSK di Kota Mojokerto Tahun 2024



Gambar 14. Dokumentasi Pengurusan IPAL dan Septic Komunal di Kota Mojokerto Tahun 2024

Beberapa *response* atau upaya terkait isu kualitas air, antara lain :

1. Response atau Upaya Tindak Lanjut Terhadap *Driving Force* Sanitasi, diantaranya :
  - a. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dilaksanakan di Kecamatan Prajurit Kulon, Magersari dan Kranggan.
  - b. Strategi Sanitasi Kota (SSK), sebagai upaya peningkatan isu kualitas air dilaksanakan evaluasi implementasi SSK selama Tahun 2024.
  - c. Pemerintah Berpartisipasi Pada Pengurusan IPAL dan Septic Komunal, khususnya melalui DPUPR selama Tahun 2024 melaksanakan Pelaksanaan Pengurusan IPAL Komunal Dan Septic Komunal pada 18 titik Kota Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024.

2. Response atau Upaya Tindak Lanjut melalui Penetapan Target Indeks Kualitas Air (IKA) terangkum dalam LKPJ Tahun Anggaran 2024 berikut:

URAIAN	2021		2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
IKA	50.06	51.00	50.12	58.95	50.18	52.63	58.96	51.58

Sumber : LKPJ Walikota Mojokerto Tahun Anggaran 2024

3. Response atau upaya tindak lanjut terkait Pengendalian Pencemaran Air dan Peningkatan Kualitas Air, melalui :

- Pelibatan Masyarakat dalam Program Kali Bersih (Prokasih), melalui peningkatan Infrastruktur Pengolahan Air Limbah berupa pembangunan IPAL Komunal. Di tahun 2024 telah dibangun tambahan 7 IPAL Komunal di Surodinawan, Blooto, Mentikan, Pulorejo, Miji, Balongsari dan Wates sehingga total telah terbangun 153 IPAL Komunal permukiman di Kota Mojokerto.
- Kegiatan Kerja Bakti Membersihkan Sungai, yang dilakukan secara rutin dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pramuka/Sekolah, Forum Kota Mojokerto Sehat, Tagana, Karang Taruna, Kader Motivator Kesehatan dan masyarakat
- Monitoring Sampah di Sungai dan Saluran serta serta pemasangan penangkap sampah sebagai infrastruktur pendukung di saluran serta penanganan pembuangan sampah liar yang ada di sekitar bantaran sungai di Kota Mojokerto.
- Pengembangan Ekowisata Kampung Tlusur, dan pada 2024, juga dikembangkan Telusur *Education Center*. Telusur *Education Center* adalah sebuah komunitas pemuda di sekitar Kali Telusur yang memberikan tempat bagi anak-anak mendapatkan tambahan pembelajaran formal sesuai kurikulum di sekolah sekaligus mereka juga mendapatkan pembelajaran soft skill seperti *public speaking* dan juga aksi peduli lingkungan.



Gambar 15. Pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Pulorejo



Gambar 16. Kegiatan Di Telusur *Education Center* di Kota Mojokerto Tahun 2024



Gambar 17. Dokumentasi Sosialisasi Ketentuan Persetujuan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Mojokerto Tahun 2024



Gambar 18. Infrastruktur Penangkap Sampah di Saluran Drainase

- e. Sosialisasi Ketentuan Persetujuan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- f. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024.
- g. Edukasi Pengelolaan Sampah.
- h. Pembangunan Infrastruktur Penangkap Sampah.
- i. Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Budidaya Ikan di Sungai dan KPP IPAL Komunal Sejahtera Kel. Pulorejo dan Sepanjang Kali Mati dimanfaatkan untuk pembibitan ikan (lele, mujaer, nila) sekaligus kolam pemancingan. Kondisi sungai terjaga kebersihannya dan ikan berkembang dengan baik.



Gambar 19. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2024



Gambar 20. Kolam Lele Pemberdayaan Masyarakat KPP IPAL Komunal Tahun 2024

4. *Response atau Upaya dalam Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Air, diimplementasikan dalam regulasi :*
  - a. Keputusan Walikota Kota Mojokerto Nomor 100.3.3/50/417.101.3/2024 Tentang Penunjukan Kader Motivator Kesehatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2024;
  - b. Keputusan Walikota Kota Mojokerto Nomor 100.3.3/60/417.101.3/2024 Tentang Penunjukan Kader Motivator Kesehatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2024;

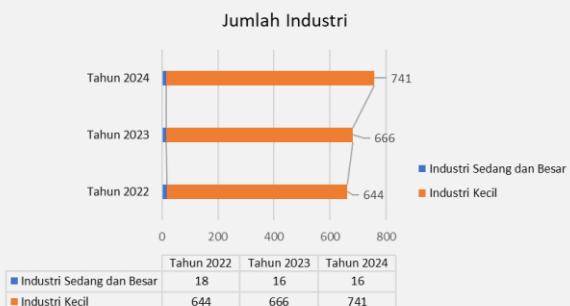
- c. Keputusan Walikota Kota Mojokerto Nomor 100.3.3/60.1/417.101.3/2024 Tentang Penunjukan Kader Motivator Kesehatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pada Wilayah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2024;
  - d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di tahun 2022. Peraturan ini akan memberikan kerangka hukum dan tata cara pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kondisi Kota Mojokerto;
  - e. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 6 Tahun 2019 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
  - f. Strategi Sanitasi Kota Mojokerto (SSK) periode 2021-2025 yang dikembangkan oleh Bappedalitbang, DPUPR Kota Mojokerto dan juga Pokja Sanitasi Kota Mojokerto;
  - g. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) yang dipublikasikan pada tahun 2020;
  - h. Rencana Induk (Masterplan) Air Limbah Kota Mojokerto yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Nomor 120 Tahun 2016;
  - i. Rencana Induk (Masterplan) Tata Kelola Drainase yang diatur di dalam Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2014 terkait dengan tata kelola drainase; dan
  - j. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
  - k. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyediaan Air Baku bagi Instansi Vertikal, Instansi Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha di Wilayah Kota Mojokerto.
5. *Response* atau Upaya peningkatan isu kualitas lahan juga terwujud dalam Penetapan Program dan Anggaran dalam Peningkatan Isu Kualitas Air, yang terakomodasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terutama pada program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran sebesar Rp 396.180.100, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 787.762.000 dan program terkait lainnya.

### I.3 KUALITAS UDARA

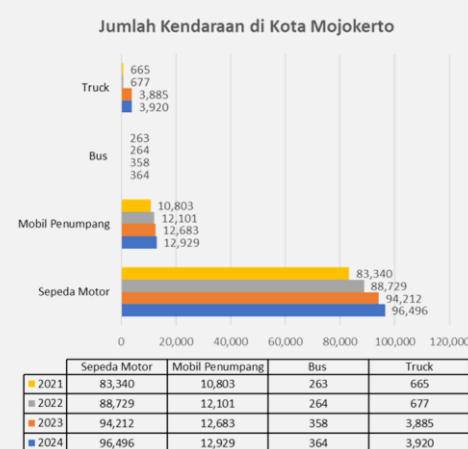
Munculnya isu kualitas udara didorong oleh adanya beberapa faktor, antara lain adanya pengaruh kegiatan ekonomi, seperti peningkatan kegiatan industri dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah industri kecil dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menjadi faktor pendorong yang berpengaruh pada isu kualitas udara di Kota Mojokerto. Kenaikan yang signifikan dari Tahun 2023 sebanyak 666 menjadi 741 di Tahun 2024 memicu pencemaran udara yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas udara.

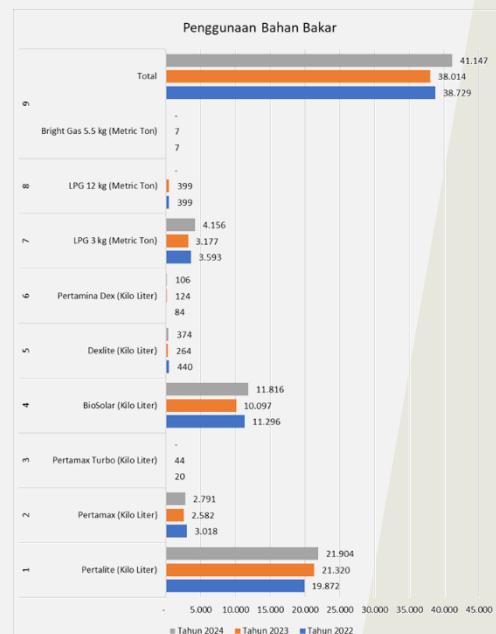
Peningkatan kadar pencemar juga dapat dipicu oleh emisi dari transportasi (kendaraan bermotor), aktivitas industri, dan pembakaran sampah. Selain itu, minimnya vegetasi, pepohonan, dan ruang terbuka hijau juga menurunkan kualitas udara karena berkurangnya kemampuan alami dalam menyerap polutan udara. Berikut data jumlah kendaraan bermotor di Kota Mojokerto. Berdasarkan data jumlah kendaraan Tahun 2024, jumlah sepeda motor, mobil penumpang, bus dan truk mengalami jumlah peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 21. Jumlah Kegiatan Industri Kecil Tahun 2024 (BPS, 2025)



Gambar 22. Jumlah Kendaraan Tahun 2024  
 Sumber: Dishub Kota Mojokerto, 2025



Gambar 23. Jumlah Penggunaan Bahan Bakar Tahun 2024  
 Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Mojokerto, PT. Pertamina Patra Niaga, 2024

Berdasarkan data tersebut (Gambar 23) dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari Tahun 2021 sebesar 98.846 unit menjadi 105.726 unit di Tahun 2022 dan menjadi sebesar 111.138 unit di Tahun 2023 serta di Tahun 2024 menjadi 113.709 unit.

Jumlah kendaraan yang paling banyak adalah sepeda motor dengan jumlah kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 83.340 unit di Tahun 2021 menjadi 88.729 unit di Tahun 2022 dan sebesar 94.212 unit di Tahun 2023 dan di Tahun 2024 menjadi 96.496.

Peningkatan jumlah unit kendaraan bermotor menjadi driver karena dapat berpotensi memicu peningkatan emisi polutan seperti nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ).

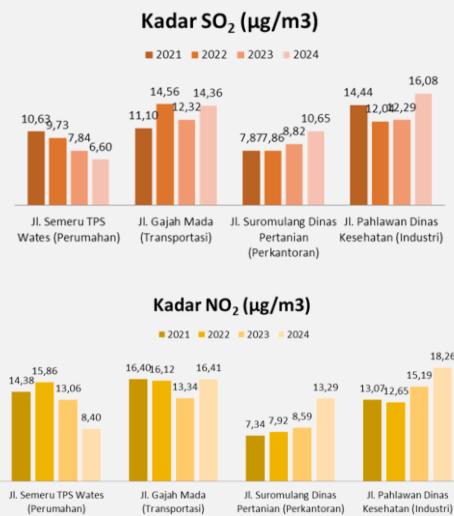
Faktor tekanan (*pressure*) terhadap isu kualitas udara di Kota Mojokerto disebabkan oleh beberapa sumber pencemar antara lain penggunaan Bahan Bakar. Berikut data penggunaan bahan bakar di Kota Mojokerto Tahun 2022 hingga Tahun 2024. Berdasarkan grafik penggunaan bahan bakar kendaraan dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan penggunaan di tahun 2024 menjadi 41.147 kiloliter. Dengan dominasi penggunaan pada pertalite sebanyak 21.904 kiloliter dan biosolar sebanyak 11.816 kiloliter.

*State* atau kondisi isu kualitas udara Kota Mojokerto dianalisis melalui data uji kualitas ambien. Berikut data uji kualitas udara ambien Tahun 2024.

Tabel 1. Data Uji Udara Ambien Tahun 2024

No	Lokasi	$\text{SO}_2$ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		Rata-rata $\text{SO}_2$ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	$\text{NO}_2$ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )		Rata-rata $\text{NO}_2$ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
		Tahap 1	Tahap 2		Tahap 1	Tahap 2	
1	Jl. Semeru TPS Magersari (Permukiman)	6,09	7,1	6,595	8,73	8,06	8,395
2	Jl. Gajah Mada (Transportasi)	13,6	15,11	14,355	15,5	17,32	16,41
3	Jl. Suromulang Dinas Pertanian (Perkantoran)	9,73	11,56	10,645	11,6	14,98	13,29
4	Jl. Pahlawan Dinas Kesehatan (Industri)	14,2	17,96	16,08	16,1	20,42	18,26
Rata-rata		Rata-rata $\text{SO}_2$		11,92	Rata-rata $\text{NO}_2$		14,09

Sumber: DLH Kota Mojokerto, 2024



Gambar 24. Grafik Kadar  $\text{SO}_2$  dan  $\text{NO}_2$  Tahun 2021-2024 (Hasil Analisis, 2025)

Dari perhitungan, Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024 adalah 79,22.

Berdasarkan hasil kategori, nilai IKU Kota Mojokerto Tahun 2024 berada dalam kondisi Baik.

Kategori	Nilai IKU
Sangat Baik	IKU > 90
Baik	70 < IKU ≤ 90
Cukup	50 ≤ IKU ≤ 70
Kurang	30 ≤ IKU < 50
Sangat Kurang	IKU < 30

Gambar 25. Kategori Nilai IKU



Gambar 26. Tren Nilai IKU 2021 - 2024



Gambar 27. Jumlah ISPA Kota Mojokerto (BPS, 2025)

Adapun *response* atau upaya tindak lanjut terhadap isu kualitas udara, antara lain :

1. Program Langit Biru, melalui Pengendalian Emisi dan Monitoring Kualitas Udara dan Pengawasan emisi gas buang kendaraan melalui uji emisi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, serta Si Imut Kerto (Sistem Informasi Manajemen Uji Kendaraan Bermotor Terintegrasi Kota Mojokerto), Angkutan Sekolah Gratis, Peningkatan Fasilitas Pedestrian, Penyediaan Jalur Sepeda, Kegiatan *car free day*, gerakan penghijauan dan penanaman pohon.
2. Penetapan target dan realisasi IKU dari Tahun 2020 hingga tahun 2024

URAIAN	2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKU	81.55	81.38	81.64	81.09	81.73	82.52	81.10	79.22

Sumber : LKPJ Tahun Anggaran 2024

3. Pengurangan Emisi dari Transportasi meliputi antara lain: Penggantian motor dinas BBM menjadi motor listrik, Peningkatan Ruang Tebuka Hijau (RTH) dan Penghijauan Kota, *Urban Farming* dan *Green Building*, Penggunaan solar cell sebagai energi alternatif melalui kegiatan Pencari Sobat Sejati (Pemafaatan Cahaya Matahari Berupa Solar Cel dan Baterai Sebagai Jaringan).
4. Penetapan Regulasi Berkaitan Peningkatan Kualitas Udara :
  - a. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Dalam regulasi ini mengatur tentang penetapan dan pelaksanaan kawasan bebas kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi polusi gas buang dari kendaraan bermotor.
  - b. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Toleransi, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat mengatur upaya pengendalian pencemaran udara yakni larangan menebang atau merusak pohon/tanaman serta larangan membakar sampah. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi emisi polutan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
  - c. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Regulasi ini berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya pengendalian emisi gas buang dari kendaraan. Dengan melakukan pengujian kendaraan secara rutin diharapkan kendaraan yang menghasilkan emisi tinggi dapat dikendalikan dan diminimalisir jumlahnya.
5. Program dan Anggaran Penanganan Isu Kualitas Udara melalui program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 2.276.203.095 dan program Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran sebesar Rp 787.762.000, serta program terkait lainnya.

#### I.4 RESIKO BENCANA

Faktor pendorong dari isu resiko bencana adalah kondisi curah hujan dan kesiapan infrastruktur pendukung yaitu jaringan drainase. Kelengkapan jaringan drainase yang menjangkau seluruh kawasan budidaya dapat menjadi faktor yang mendorong ketangguhan suatu wilayah dalam menghadapi potensi isu bencana khususnya banjir.

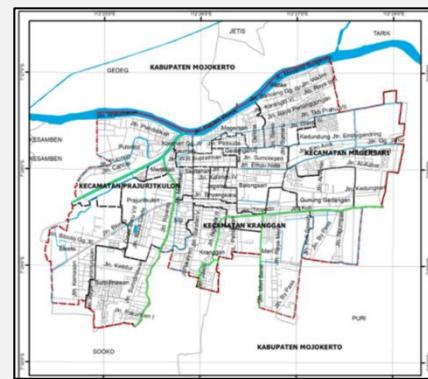
Kondisi drainase di Kota Mojokerto terdiri dari saluran pematusan/afvour dan jaringan irigasi. Dilihat dari fisiknya drainase dibedakan menjadi drainase primer, sekunder dan tersier. Jaringan drainase primer adalah saluran yang menerima masukan aliran air dari saluran-saluran sekunder. Kondisi fisik drainase primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air. Tantangan terhadap kondisi drainase Kota Mojokerto adalah penggunaan jaringan irigasi yang juga berfungsi sebagai drainase mengakibatkan perlunya penyesuaian ketinggian air dengan menggunakan pompa sehingga air hujan/genangan dapat ditampung dan tidak menimbulkan banjir.

Adapun *impact* (dampak) dari isu resiko bencana banjir antara lain: Bencana Banjir pada Desember 2024 meliputi 5 kelurahan di 2 kecamatan di Kota Mojokerto, yaitu pada Kecamatan Prajurit Kulon meliputi: Kemudian pada Kecamatan Magersari, meliputi: Kelurahan Kedundung (wilayah Randegan, Sekarputih, Balongrawe). Dampak dari kejadian banjir ini mengakibatkan kerusakan ringan pada kawasan Pasar Tradisional, Warung, Lahan Sawah, Tegalan/Kebun, Ternak Besar, Unggas, Industri dan Tempat Wisata.

Adapun *response* atau Upaya Tindak Lanjut Terhadap Penanganan Bencana Banjir, antara lain :

#### Aksi Cepat Tanggap Bencana Banjir

1. Dapur umum terpusat didirikan di Gedung PLUT Maja Citra Kinarya, Kelurahan Blooto. Posko kesehatan juga telah dibentuk di lokasi terdampak untuk memudahkan akses layanan kesehatan serta pembagian obat-obatan dan vitamin. Selain itu, Posko Bencana di Kantor Kecamatan Prajurit Kulon dibentuk untuk mempermudah koordinasi.
2. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir  
Pengerahan pompa untuk menyedot dan mengalirkan air ke anak Sungai Brantas, termasuk Sungai Ngotok.
3. Pembangunan Infrastruktur Drainase  
Pembangunan Fasilitas Umum Kolan Retensi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pembangunan, antara lain :



Gambar 28. Peta Saluran Primer dan Sekunder  
Kota Mojokerto

Sumber : DPUPR Kota Mojokerto, 2024

- a) Pembangunan Saluran Air di Kelurahan Wates;
- b) Pembangunan Saluran Air di Kelurahan Kedundung;
- c) Pembangunan Saluran Air di Kecamatan Prajuritkulon;
- d) Pembangunan Saluran Air di Kecamatan Kranggan;
- e) Pembangunan Saluran Air di Kelurahan Balongsari, Kelurahan Gunung Gedangan dan Kelurahan Magersari;
- f) Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Pulorejo;
- g) Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Kranggan;
- h) Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Magersari;
- i) Pembangunan Jalan Lingkungan Kecamatan Prajuritkulon.

Upaya peningkatan isu kualitas lahan juga terwujud dalam Penetapan Program dan Anggaran dalam Peningkatan Isu Resiko Bencana, yang terakomodasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yakni Program Penanggulangan Bencana oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi anggaran sebesar Rp 316.785.320 dan Program Penanganan Bencana sebesar Rp 321.448.873.

## I.5 PERKOTAAN

Dalam isu Perkotaan, jumlah penduduk sebagai *driving force* yang memicu tingginya volume timbulan sampah. Adapun *pressure* atau tekanan terhadap isu perkotaan adalah volume timbulan sampah yang ada di Kota Mojokerto. Dalam data DLH Kota Mojokerto, jumlah timbulan sampah Tahun 2023 sebesar 36.226 atau mencapai 99,59 ton perhari. Sedangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DLH Kota Mojokerto Tahun 2024 diketahui sebagai berikut (Lihat Tabel 2).

KETERANGAN	Tahun 2023	Tahun 2024	PERUBAHAN (2024-2023)	Persen
<b>I. POTENSI TIMBULAN SAMPAH</b>	35.882,93	36.226,07	343,14	1%
<b>II. JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH</b>	5.701,70	5.786,17	84,47	1%
<b>Persentase pengurangan sampah</b>	15,89%	15,97%	0,08%	-
a. Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	614,91	489,69	-125,22	-20%
b. Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	2.871,93	3.064,12	192,19	7%
c. Jumlah Daur Ulang Sampah	2.214,86	2.232,28	17,42	1%
<b>III. JUMLAH PENANGANAN SAMPAH</b>	29.816,85	30.039,09	222,65	1%
<b>IV. SAMPAH YANG DIKELOLA (I + II)</b>	35.518,55	35.825,67	307,12	1%
<b>V. SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)</b>	364,38	400,4	36,02	10%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DLH Kota Mojokerto, 2025

Tabel 2. Neraca Pengelolaan Sampah Kota Mojokerto Tahun 2023-2024

*State* atau kondisi isu perkotaan didapatkan melalui data sarana pemindahan sampah berupa transfer depo yang berjumlah 5 unit, TPS sejumlah 11 lokasi dan TPST 3R terdapat 2 lokasi. Kota Mojokerto memiliki 1 TPA yakni TPA Randegan. Sedangkan persentase layanan telah memenuhi 100% di seluruh wilayah Kota Mojokerto.

Adapun sepanjang Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan sebagai bentuk *impact* (dampak) yang terjadi terkait penumpukan sampah :

1. Terjadinya penumpukan sampah di TPS Benteng Pancasila yang disebabkan adanya permasalahan alat berat yang pengangkut sampah mengalami kerusakan, sehingga kendaraan pengangkut sampah yang menuju pusat pembuangan sampah terhambat.
2. Kondisi Sungai Brangkal yang melintasi Jalan KH. Usman, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dipenuhi sampah dan tanaman liar pada Oktober 2024. Potensi banjir di musim penghujan dapat mengakibatkan terjadinya luberan air sungai ke kawasan pemukiman.

*Response* atau Upaya Tindak Lanjut Terhadap Isu Perkotaan antara lain:

1. *Reponse* terkait Penanganan dan Pengurangan Sampah, yaitu :

- a. BAJAK SAMBAL TERASI (Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi). BAJAK SAMBAL TERASI merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui laman [banksampah.mojokertokota.go.id](http://banksampah.mojokertokota.go.id). Aplikasi ini memungkinkan anggota dan pengurus Bank Sampah dapat mencatat dan mengetahui nilai transaksi yang dihasilkan oleh sampah yang dikelola, yang sebelumnya proses tersebut dilakukan secara manual. Selain itu aplikasi BAJAK SAMBAL TERASI juga telah diintegrasikan dengan basis data PBB Kota Mojokerto, sehingga anggota Bank Sampah dapat membayar tagihan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) menggunakan saldo yang terkumpul pada aplikasi ini.
- b. SUHITA (Sukseskan Jemput Bola Pendampingan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota), melalui Kegiatan Reduksi dan Pengolahan Sampah melalui Bank Sampah dan TPS 3R yang mencakup pemilahan sampah, daur ulang, pengomposan dan budidaya maggot untuk pengelolaan sampah organik, program Adiwiyata (penyuluhan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah), Program Pembinaan Kelurahan Berseri (diimplementasikan di kelurahan Gedongan, Kelurahan Miji, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Kedundung, Kelurahan Surodinawan, Kelurahan Wates, Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Meri), Proklim (dilaksanakan di Kelurahan Wiji, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Gedongan, Program Pembinaan Saka Kalpataru (kemah hijau dengan kegiatan penanaman pohon dan bakti sosial pembersihan lingkungan), Program Gempa Genting (program untuk meningkatkan gizi anak-anak dengan stunting melalui budidaya ternak lele sekaligus membantu mengurangi timbulan sampah organik melalui budidaya maggot), Debu Meja Kursi (budidaya maggot

yang tidak hanya berdampak pada upaya pengurangan sampah organik sekaligus menambah nilai ekonomis sebagai pakan ternak ikan sehingga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat kota Mojokerto), Program gerakan Sedekah Sampah dan Lisa Berdasi (dilaksanakan oleh pemerintah kota Mojokerto merupakan komitmen untuk menjaga kebersihan Kota dan mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif), JIROLU (Pemerintah kota Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto telah mengembangkan JIROLU (Jaringan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada laman website <https://dlh.mojokertokota.go.id>, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait digitalisasi pelaporan semester dokumen lingkungan bagi pelaku usaha/kegiatan, informasi Ruang Terbuka Hijau, serta pelayanan retribusi persampahan), Es Degan (Edukasi dan Rekreasi di TPA Randegan yang dilakukan sebagai upaya penambahan fungsi TPA sebagai pusat edukasi lingkungan sehingga diharapkan menambah pemahaman Masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pemilahan sampah).

2. *Response* atau Upaya dalam Pentapan Regulasi Berkaitan Penanganan dan Pengurangan Sampah melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Upaya peningkatan masalah perkotaan juga terwujud dalam Penetapan Program Perangkat Daerah terkait Isu Perkotaan, yang terakomodasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang terdapat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024, salah satunya dengan nilai sebesar Rp 2.486.487.656 pada Program Pengelolaan Persampahan, serta program terkait lainnya.

## I.6 TATA KELOLA

Adapun yang menjadi *driving force* (faktor pendorong) pada isu tata kelola adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran dan realisasi program pada DLH Kota Mojokerto. Total realisasi PAD Kota Mojokerto Tahun 2024 adalah Rp 270.623.653.368,66. Sedangkan anggaran dan realisasi DLH Kota Mojokerto Tahun 2024, antara lain Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi anggaran Rp 2,486,487,656.00, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan realisasi anggaran Rp 2,276,203,095.00, serta program anggaran terkait lainnya.

*Pressure* atau tekanan yang timbul akibat adanya driving force isu tata Kelola adalah adalah adanya pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan. Adapun pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan yang terjadi pada Tahun 2024, antara lain :

- a. Pengaduan bau pembuangan limbah RPH/Rumah Pemotongan Hewan (sapi) Sekarputih ke sungai, yang telah dilakukan upaya tindak lanjut Dilakukan monev ke lokasi RPH pada 16 Januari 2024 dan pengecekan pembuangan air limbahnya.
- b. Bau dari saluran pembuangan air limbah dari usaha Bebek Carok Jl. Gajah Mada dan adanya gumpalan lemak bekas kegiatan di saluran avour sebelah lokasi usaha, yang telah dilakukan upaya tindak lanjut dilakukan pengecekan ke lokasi dan pengambilan sampel air limbah untuk pengujian.
- c. Pembuangan air limbah usaha catering (warung makan Bebek) di saluran air Lingkungan Magersari Gg. Buntu RT03/RW02 menimbulkan gangguan bau busuk. Terkait pengaduan ini, telah dilakukan upaya tindak lanjut pengecekan ke lokasi bersama dengan Lurah Balongsari untuk mencari penyebab *sludge/minyak* bekas penggorengan bisa sampai tidak terolah dengan baik dan dilakukan pengecekan instalasi pengelolaan air limbah yang masih belum maksimal dalam melakukan pengelolaan air limbah yang dihasilkan.

*State* (kondisi) tata kelola DLH Kota Mojokerto, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto.

Adapun *impact* isu tata kelola dianalisa dengan menggunakan data hasil capaian kinerja, dokumen lingkungan yang dihasilkan karena keduanya dapat memberi dampak terhadap lingkungan hidup yang terangkum pada data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.

Sebagai *Response* atau Tindak Lanjut Terhadap Isu Upaya Penanganan Isu Tata Kelola, antara lain :

1. Response atau Upaya Tindak Lanjut melalui Penetapan Target Indeks Kualitas Udara (IKLH)

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target 2024	Target 2025	Target 2026	Kondisi Akhir
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Layak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,57	60,58	60,59	60,6	60,6

Sumber : RPD Kota Mojokerto, 2025

2. Response atau Upaya Tindak Lanjut melalui Penetapan Regulasi Pengelolaan dan Penanganan Isu Tata Kelola, antara lain :
  - a. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/ 13/417.101.3/2024 tentang Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Dan Penilai Adiwiyata Kota Mojokerto Tahun 2024.
  - b. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/ 51/417.101.3/2024 tentang Forum Komunikasi Kelurahan Sehat Tingkat Kecamatan Dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Tahun 2024.
  - c. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/ 61/417.101.3/2024 tentang Forum Komunikasi Kelurahan Sehat Tingkat Kecamatan Dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto Tahun 2024.
  - d. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/ 61/417.101.3/2024 tentang Forum Komunikasi Kelurahan Sehat Tingkat Kecamatan Dan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2024.

## ANALISA DPSIR ISU LAHAN

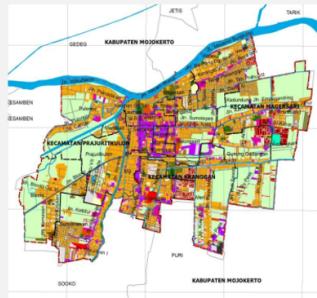
### DRIVING FORCE



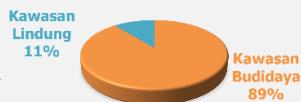
### PRESSURE



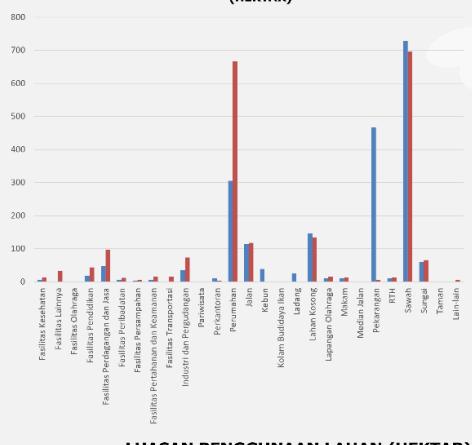
### STATE



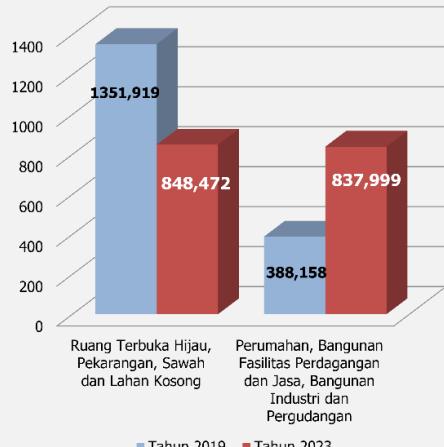
### PERSENTASE KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA



### PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TAHUN 2020 DAN 2024 (HEKTAR)

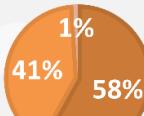


### LUASAN PENGGUNAAN LAHAN (HEKTAR)



### PERSENTASE TUTUPAN LAHAN

■ RTH ■ Taman Kehati ■ Tutupan Vegetasi Relevant Lainnya



### IKL KOTA MOJOKERTO TAHUN 2024 :

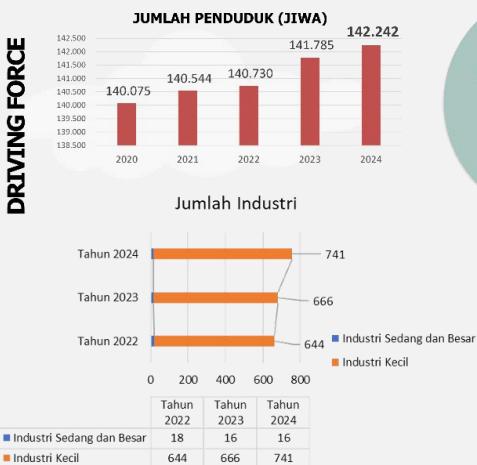
**26,69**



- IMPACT
- RESPONSE
1. Kebijakan Regulasi
  2. Pengembangan taman kota
  3. Program penghijauan : Adiwiyata, Program Kelurahan Berseri dan Program Kampung Iklim
  4. Gerakan penanaman pohon
  5. SUHITA *Urban Farming*

## ANALISA DPSIR KUALITAS AIR

DRIVING FORCE



PRESSURE



PENURUNAN KUALITAS AIR SUNGAI

STATE



RESPONSE

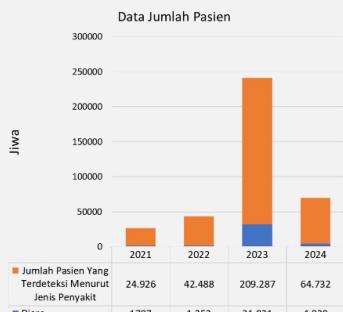
PENINGKATAN  
JUMLAH PENDUDUK  
SEIRING DENGAN  
BERTAMBAHNYA  
KEBUTUHAN AIR  
BERSIH

PERKEMBANGAN  
KEGIATAN INDUSTRI  
BERPERAN DALAM  
POTENSI  
PENCEMARAN AIR

JIKA PRODUKSI  
LIMBAHNYA TIDAK  
DIKELOLA DENGAN  
BAIK

### IMPACT

Adanya warga terdampak penyakit diare  
karena penurunan kualitas air bersih



### • PROGRAM KALI BERSIH (PROKASIH)

- PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL
- KERJA BAKTI BERSIH SUNGAI DAN SALURAN
- SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

### • EDUKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN BANTARAN SUNGAI YANG DILAKUKAN BERSAMA RELAWAN JATIM JOGO KALI

### • EDUKASI PENGELOLAAN SAMPAH YANG DIBERIKAN KEPADA SEKOLAH-SEKOLAH DAN KOMUNITAS LINGKUNGAN, MELALUI PROGRAM ADIWIYATA, KELURAHAN BERSERI DAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM

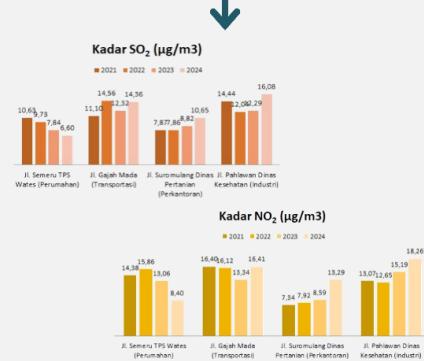
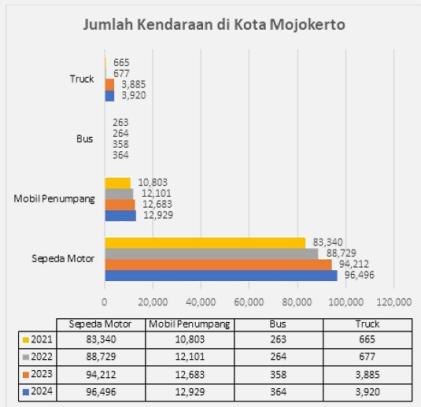
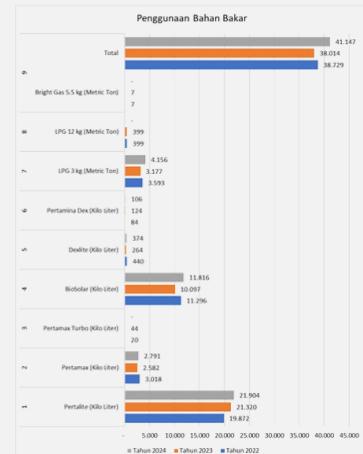
### • REDUKSI DAN PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DAN TPS 3R

### • MONITORING DAN PENEGERAKAN HUKUM YANG MELIPUTI PEMANTAUAN RUTIN KUALITAS AIR SUNGAI SECARA MANUAL DAN OTOMATIS (ONLIMO KLH),

### • AKAN DIBUAT KAJIAN INVENTARISASI PENCEMARAN SUNGAI DI KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025



## ANALISA DPSIR KUALITAS UDARA



### PROGRAM LANGIT BIRU

- PENGENDALIAN EMISI DAN MONITORING KUALITAS UDARA
- PENGURANGAN EMISI DARI TRANSPORTASI
- PENINGKATAN RUANG TEBUKA HIJAU (RTH) DAN PENGHIJAUAN KOTA
- URBAN FARMING DAN GREEN BUILDING

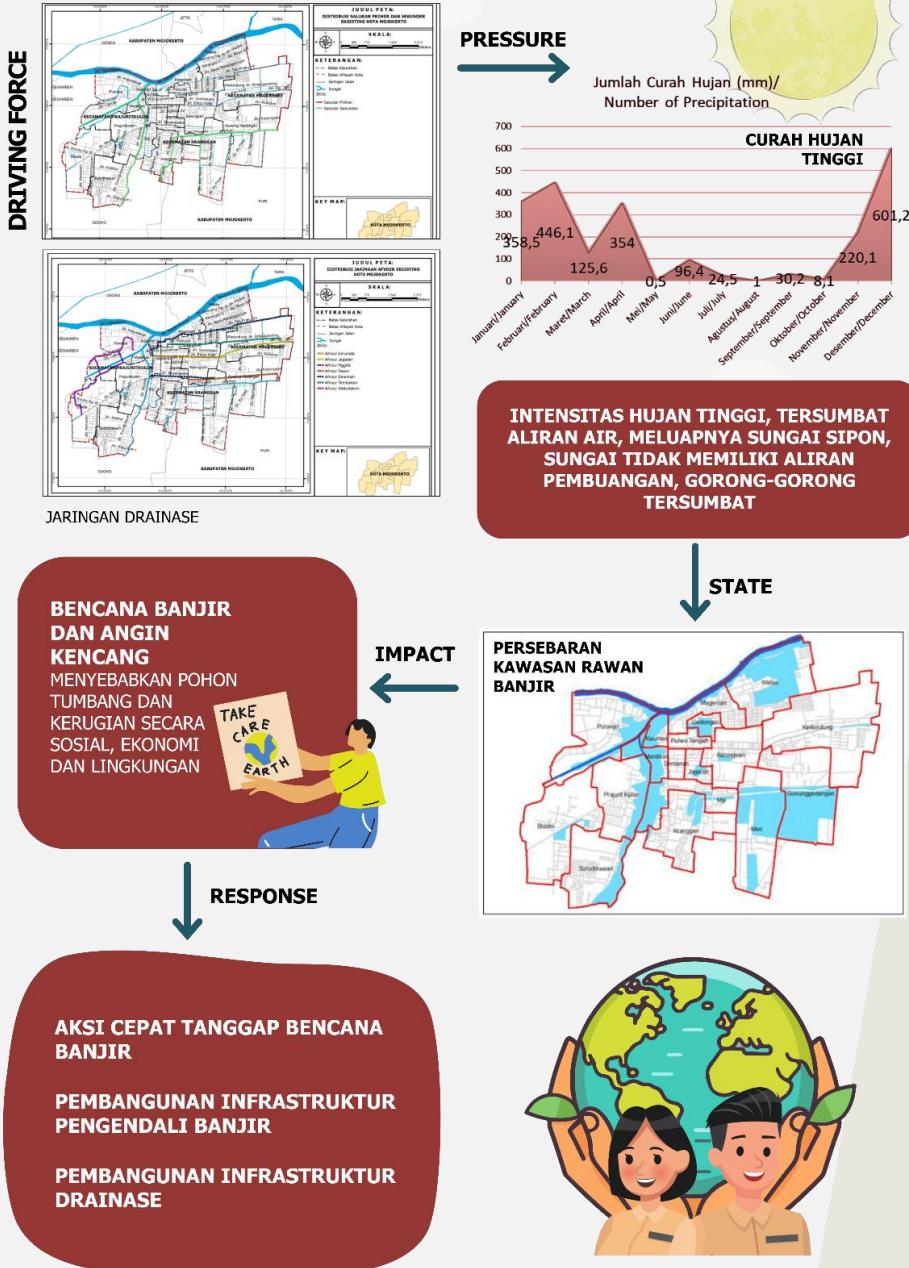
←  
RESPONSE

STATE  
IKU  
KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2024 :

**79,22**



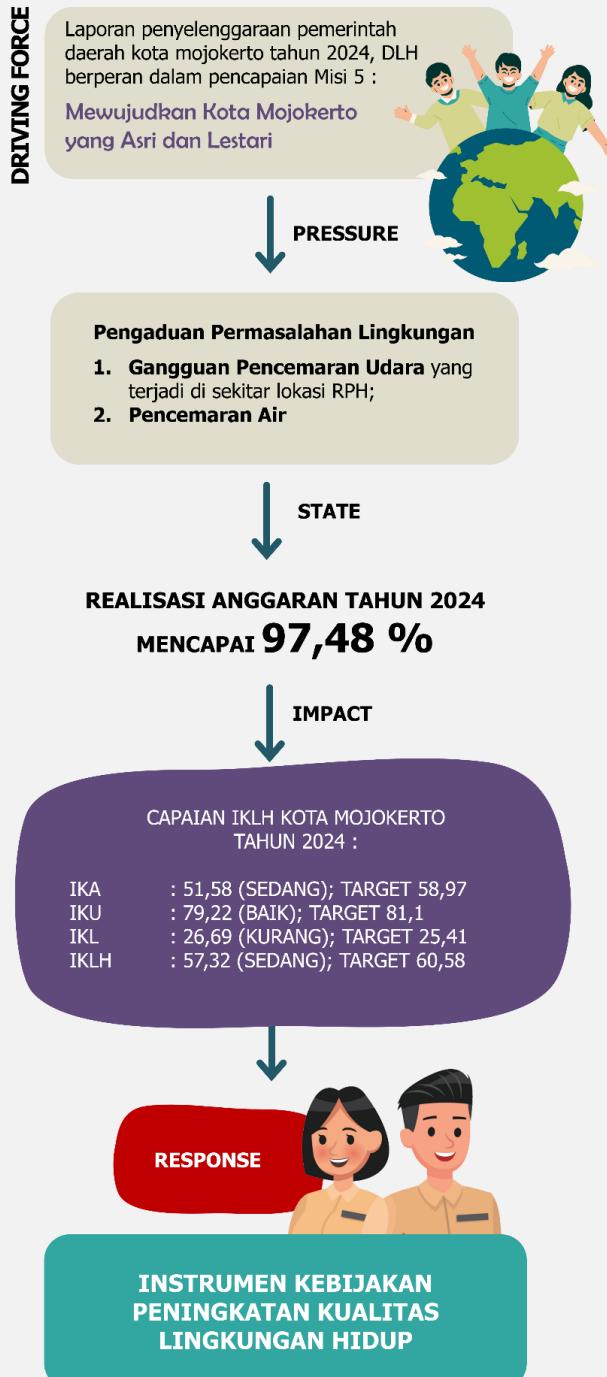
## ANALISA DPSIR ISU BENCANA



## ANALISA DPSIR PERKOTAAN



## ANALISA DPSIR ISU TATA KELOLA



## II. PERUMUSAN ISU PRIORITAS

Proses perumusan isu prioritas dilaksanakan melalui diskusi dan penjaringan isu prioritas melalui metode pengisian kuesioner dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) termasuk masyarakat, komunitas pemerhati lingkungan hidup dan pelaku usaha. Diskusi dilakukan melalui kegiatan FGD dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto pada Hari Selasa, 29 April di Aula DLH Kota Mojokerto dengan narasumber Dr. Ir. Susi Agustina Wilujeng, S.T., M.T. dengan beberapa OPD terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Mojokerto, dan OPD lainnya yang terkait. Diskusi FGD ini juga mengundang masyarakat dengan diwakili oleh Forum Kota Mojokerto Sehat (FKMS) dan Ketua LSM Walantara. Berikut dokumentasi dalam kegiatan FGD dan Pengisian Kuesioner Pemilihan Isu Prioritas IKPLHD Tahun 2025.



Gambar 28. Dokumen FGD DIKPLHD Tahun 2025

Peserta diskusi melanjutkan *desk* dengan mengisi kuesioner pada: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP9waB6bp1VOUAVbgiNKxV9CB2SFqhmRE7co9KgYSOrr3KLw/formResponse>. Pemberian skor bobot diberikan pada setiap isu terkait dengan 6 (enam) kriteria penilaian, yakni aktual, sensitif, relevan, urgen, konsisten dan signifikan. Dalam tahapan ini menghasilkan : Isu Perkotaan khususnya pada faktor Permasalahan pengelolaan sampah memiliki nilai tertinggi dengan skor 286.

Selanjutnya adalah Isu Lahan yakni pada faktor Kurangnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau/Taman/Penghijauan dengan total skor 276. Dan yang ketiga Isu Bencana yakni pada faktor Adanya kejadian banjir dengan total skor 275. Berikut analisis skor penilaian total dari hasil kuesioner.

### III. Inovasi terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan sebagai solusi dalam mengatasi masalah isu prioritas, antara lain :

Tabel 3. Penyelesaian Permasalahan Isu Prioritas melalui Inovasi

No	Inovasi	Penyelesaian terhadap Isu Prioritas
1	Sumpah Bang Jai (Sulap Sampah Dengan Lubang Ajaib)	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah
2	Sumpah 3 MPU (Sistem Pengumpulan Sampah SMPN 3 Mojokerto Peduli Lingkungan)	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah
3	Gilie Berkisah "Giat Literasi Ekologi Berkreasi Sulap Sampah	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah
4	"Mager Bersama" yang merupakan akronim dari Mari Gerilya Berburu Sampah	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah
5	Mi Saori (Pemilahan Sampah Organik/Non Organik SDN Meri)	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah
6	Pengelolaan Sampah Menuju Go Green Berbasis 3r (Reduse, Reuse, Recycle) Di RT. 002 RW. 001 Lingkungan Cakarayam Kelurahan Mentikan	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah
7	Gempa Genting Ning Emi (Segenggam Sampah Gawe Stunting Lan Peningkatan Ekonomi)	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah
8	Maduleni Manis (Pemanfaatan Air Wudu Untuk Budidaya Lele Dan Nila Menggunakan Maggot Untuk Mengurangi Sampah)	Faktor Permasalahan Pengelolaan Sampah

Sumber : Hasil Analisis, 2025

### IV. DAMPAK LINGKUNGAN SETELAH PENERAPAN INOVASI

Berdasarkan hasil analisis inovasi yang diterapkan, Pemerintah Kota Mojokerto telah dapat mengembangkan upaya dan inovasi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup terutama terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah. Beberapa inovasi terkait permasalahan ini, seperti Sumpah Bang Jai, Sumpah 3 MPU, Gilie Berkisah, "Mager Bersama", Mi Saori, Pengelolaan Sampah Menuju Go Green Berbasis 3R serta Gempa Genting Ning Emi telah berhasil meningkatkan jumlah pemanfaatan kembali sampah dan jumlah daur ulang sampah. Sebagaimana terdapat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) DLH Kota Mojokerto Tahun 2024, diketahui bahwa Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah meningkat sebesar 192,19 ton atau sebanyak 7% dan Jumlah Daur Ulang Sampah meningkat sebesar 17,42 ton atau sebanyak 1% dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan Jumlah Pengurangan Sampah sebesar 84,47 ton atau sebesar 1% dari seluruh timbulan sampah di Kota Mojokerto.

## V. PENUTUP

Pengembangan inovasi untuk menjawab permasalahan isu utama pengelolaan sampah perlu ditingkatkan pada lebih banyak kawasan di Kota Mojokerto agar pengelolaan sampah dapat dilaksanakan mulai dari skala rumah tangga sehingga diharapkan jumlah daur ulang dan pengurangan sampah dapat ditingkatkan dan jumlah timbulan sampah ke TPA dapat berkurang.

Untuk kedepannya, Pemerintah Kota Mojokerto juga perlu pengembangan inovasi yang dapat terfokus pada peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai solusi dalam menjawab permasalahan kualitas isu lahan serta peningkatan kualitas sungai dan drainase untuk menjawab permasalahan isu resiko bencana teutama masalah banjir.



**PEMERINTAH  
KOTA MOJOKERTO  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Raden Wijaya No.19,  
Kota Mojokerto, Jawa Timur 61321

